

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Wilayah perbatasan negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara yang seringkali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah yang mencakup permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara yaitu; penetapan garis batas baik darat maupun laut, pengamanan kawasan perbatasan dan pengembangan wilayah perbatasan, hal ini diakibatkan wilayah perbatasan merupakan batas kedaulatan yang juga merupakan suatu wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara.

Dilihat dari sisi geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak diantara dua benua, memiliki perbatasan darat Republik Indonesia (RI) berbatasan dengan 3 negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic state*) memiliki batas wilayah maritim berupa batas laut wilayah (teritorial), batas landas kontinen dan batas zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan 10 negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste dan Australia. Kondisi ini menjadikan landasan penting bagi pemerintah Indonesia dalam membangun kedaulatan bangsa dan negara. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang meliputi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi penegakkan hukum, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

Perkembangan lingkungan strategis merupakan salah satu konsep yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan negara. Terkait dengan pulau pulau kecil terluar, situasi yang dilihat adalah isu perbatasan antarnegara. Keberadaan 92 pulau-pulau kecil terluar yang 12 diantaranya adalah kawasan prioritas pengelolaan kedaulatan NKRI. Hal ini

menunjukkan adanya kerawanan atau dianggap memungkinkan untuk menjadi sumber konflik perbatasan dengan negara tetangga apabila tidak diantisipasi sejak dini, sehingga perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Posisi Indonesia yang rawan konflik di Kawasan Asia Pasifik, sehingga perlu mengoptimalkan pertahanan di pulau-pulau kecil terluar tersebut. Pembangunan postur pertahanan di pulau-pulau kecil terluar dan aktif dalam forum internasional, menjadi hal yang penting untuk membawa isu serta predikat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015)

Keberadaan pulau-pulau terluar yang rata-rata hanya merupakan pulau kecil dan tidak berpenghuni, kurang memberikan kontribusi yang berarti bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat di sekitar pulau tersebut. Namun karena pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau terluar dan memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka pulau-pulau tersebut memiliki nilai yang sangat strategis, sekaligus rawan terhadap sengketa kepemilikan di masa mendatang. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki spektrum yang luas, bukan hanya sebatas aspek ekonomis, tetapi juga terkait aspek politis dan aspek pertahanan dalam rangka menjadi integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Gambar 1.1 Peta Posisi 12 Pulau Kecil Terluar
Sumber: Laplak Spotmaral, 2021

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) dan memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. (Perpres Nomor 78 Tahun 2005).

Sebagaimana disebutkan juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara dimana peraturan ini secara khusus membahas tentang pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang disebut sebagai beranda depan NKRI. Terkait pertahanan terhadap pulau-

pulau kecil terluar yakni menekankan pada pengintegrasian peran maupun fungsi Kementerian/Lembaga serta upaya diplomasi secara bilateral/multilateral dengan negara tetangga. Dalam Kebijakan Pertahanan Negara ini, Pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu prioritasnya, salah satunya melalui pemberdayaan wilayah pertahanan untuk pengamanan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan-kawasan itu secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari berbagai kepentingan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sebenarnya menjadi tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, BNPP beranggotakan 19 Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kemerkopluhukam, KKP, Kemendagri, Kemehnan, Kemenlu, Kemenhub, Kemen PU, Kemen ESDM, Kemenkes, Kemendiknas, Kemekeu Kemenkumham, Kemenhut, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemen PDT, Sekretaris Kabinet, TNI, POLRI, BIN. Dalam penelitian ini akan membahas tentang kontribusi TNI AL dalam pembinaan wilayah perbatasan.

Sebagai wilayah perbatasan, Sabang (Pulau Weh) secara administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan secara *de facto* sebenarnya bukan pulau paling barat dan utara Indonesia, akan tetapi sudah identik sebagai pulau dibagian paling barat dan utara Indonesia. Dalam sejarah dijelaskan bahwa posisi Sabang pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang sedang menguasai wilayah ini pada saat itu, membangun sebuah pelabuhan pengisian air dan batubara yang biasa disebut "*Kolen Station*". Selanjutnya pelabuhan Sabang ini

semakin besar dan dijadikan tempat mensuplai komoditi export hasil bumi Nusantara ke Eropa. Sehingga menjadi pelabuhan bebas yang dikenal dengan Sabang *Maatsscappij*. (<http://www.sabangkota.go.id/profil/sejarah/>).

Wilayah perairan Sabang seringkali terjadi kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab (*illegal fishing*). Terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan, pencurian ikan dan tindak *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya merugikan bagi negara namun berdampak pula bagi masyarakat nelayan tradisional. *Illegal fishing* sendiri diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di perairan ZEE suatu negara, kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki izin melakukan penangkapan ikan dari negara yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat tangkap modern berupa pukat harimau yang ditunjang dengan fasilitas penyimpanan ikan secara modern hingga mampu bertahan dilautan dalam waktu yang relatif lama.

Selain itu terjadinya perubahan ekosistem yang bukan disebabkan oleh aktivitas di laut semata, namun aktivitas di darat yang membawa dampak ke laut (Ali sarong, 2011). Penyebab perubahan ekosistem wilayah pesisir adalah aktivitas perekonomian yang tidak terkendali dan kesadaran pentingnya pelestarian sumberdaya alam wilayah pesisir yang masih rendah di kalangan lintas pelaku, (Dahuri, 2004), Selain itu, perubahan ekosistem disebabkan oleh bencana alam seperti Tsunami, banjir longsor dan lainnya. Bencana Tsunami telah mengakibatkan sebagian besar kawasan pesisir Sabang beserta ekosistemnya mengalami kerusakan.

Perubahan ekosistem terumbu karang pada akhirnya mempengaruhi populasi ikan dan dapat berimplikasi pada aktivitas melaut dan perekonomian para nelayan (Satria, 2009). Dampak sosial ekonomi nelayan akibat perubahan ekosistem mangrove dan karang adalah menurunnya keanekaragaman ikan, hilangnya substrat, kerusakan lingkungan baik yang terjadi di kawasan pesisir maupun di daratan pada pulau kecil secara langsung dan tidak langsung menyebabkan kerusakan

habitat ikan sehingga dan menurunnya kesempatan berusaha dan mata pencaharian masyarakat terganggu

Permasalahan lain yang marak terjadi di Sabang adalah adanya *human trafficking*. Masuknya Etnis Rohingya yang merupakan salah satu kelompok/suku di negara Myanmar yang merasakan ketidakadilan dan dianggap bukan berasal dari suku asli Myanmar (Sonjaya, 2021). Perilaku yang didapatkan etnis Rohingya membuat mereka berusaha melarikan diri ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan atau mendapatkan hidup yang lebih baik melalui jalur laut. Imigran ini memiliki tujuan ke berbagai negara, seperti Malaysia, Australia, dan ke negara lain termasuk Indonesia. Selain itu, banyaknya imigran yang menyerahkan diri ke pihak imigrasi untuk bisa melindungi diri mereka dari ancaman, kelaparan, dan mendapatkan hidup yang layak (Aryanto, 2013).

Kecenderungan meningkatnya permasalahan keamanan maritim di wilayah Sabang menjadikan suatu masalah sosial di lingkungan masyarakat, hal ini yang terdampak dengan adanya kondisi bahwa masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dengan hasil laut, sebagai contoh permasalahan illegal fishing dan perubahan iklim membuat populasi ikan berkurang inilah yang menjadikan permasalahan atau potensi bencana/hazard bagi nelayan. Jika terjadinya suatu permasalahan maka akan mempengaruhi lingkungan sosialnya, hal ini menunjukkan adanya kerentanan yang terjadi di wilayah Sabang. Dibutuhkan kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kesulitan hidup atau kejadian yang berat, maka dengan ketahanan yang kuat masalah dan kesengsaraan dalam kehidupan tidak menimbulkan stres dan sanggup diatasinya dengan baik. Ketahanan sosial, yang dimiliki komunitas ini dapat dilihat dari kemampuan membangun partisipasi dan kelembagaan komunitas. Sehingga dibutuhkan peran dari aktor-aktor untuk membantu mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan termasuk didalamnya ada peran dari TNI AL melalui Program Pembinaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan meningkatkan ketahanan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), pada pasal 9 ayat (e); Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dawilhanla). Penyelenggaraan Dawilhanla adalah kegiatan pengelolaan potensi sumber daya nasional menjadi potensi pertahanan laut untuk kepentingan pertahanan negara. Proses menyiapkan suatu wilayah Pertahanan beserta kekuatan pendukungnya memiliki hubungan yang berkaitan dengan penyiapan ruang, alat dan kondisi juang. Pembinaan dalam sektor geografi merupakan penyiapan ruang juang untuk kepentingan manuver pasukan dan logistik wilayah serta penyiapan sumber daya menjadi kekuatan pendukung pertahanan. Pada pembinaan sektor demografi merupakan penyiapan alat juang yang dipersiapkan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang mampu didayagunakan untuk membantu komponen utama.

Staf Umum Potensi Maritim TNI Angkatan Laut (Spotmar TNI AL), organisasi yang dibentuk tanggal 9 September 2016 merupakan Staf Umum pembantu pimpinan di tingkat Markas Besar Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kasal. Spotmar bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi Staf Umum TNI Angkatan Laut di bidang Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) yang meliputi perencanaan program dan anggaran, kemampuan potensi maritim, ketahanan wilayah maritim, komunikasi sosial maritim, bakti TNI Angkatan Laut dan pembinaan perbatasan laut/pulau pulau kecil terluar dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) guna menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut (Perkasal 2016).

Penyelenggaraan Dawilhanla juga dimaksudkan untuk mensinergikan peran instansi fungsional dalam membina SDM, SDAB, Sarprasnas, Iptek, nilai-nilai luhur budaya bahari menjadi kekuatan

kewilayahan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan laut, dilihat dari 3 perspektif Dawilhanla adalah sebagai berikut (Perkasal, 2011):

- a. Perspektif kepentingan pertahanan negara bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan
- b. Perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim.
- c. Perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI.

Salah satu program Spotmar TNI AL yaitu Pembinaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Binwiltasla dan PPKT) melalui peningkatan ketahanan masyarakat. Program ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, baik secara berdiri sendiri atau bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan laut yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemandirian TNI Angkatan Laut dengan rakyat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas TNI Angkatan Laut (Jukgar Binwiltasla, 2021)

Selanjutnya program ini akan diimplementasikan secara berjenjang kepada satuan Potensi Maritim dari tingkat Armada, Lantamal ataupun Lanal-Lanal terpilih sesuai dengan alokasi anggaran yang ada, kegiatan dilakukan baik secara fisik seperti pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan pemerintah maupun non fisik yang diisi dengan penyampaian materi Bela Negara, Kecintaan terhadap tanah air, Kebhinekaan dan wawasan kebangsaan, serta memperkenalkan Tugas dan Fungsi selain itu

ada juga kegiatan yang langsung dilaksanakan secara langsung yaitu dengan melaksanakan kegiatan di wilayah perbatasan yaitu Satgas Pengamanan Pulau terluar (Satgas PAMPUTER) dan Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas PAMTAS) yang merupakan kegiatan gabungan Spotmar TNI AL dengan unsur KRI, Marinir, Sopsal, dan personel bidang terkait sesuai dengan tema kegiatan.

Kegiatan pembinaan Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui peningkatan ketahanan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kekuatan kewilayahan matra laut guna tertatanya sistem logistik wilayah dan kekuatan masyarakat maritim sebagai kekuatan pengganda untuk mendukung pencapaian pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. Keberhasilan dari penyelenggaraan pembinaan Wilayah Perbatasan Laut dan Pulau -Pulau Kecil Terluar melalui peningkatan ketahanan masyarakat dilihat dari terwujudnya RAK juang yang tangguh dan kemandirian TNI Angkatan Laut dengan rakyat dalam rangka mendukung pertahanan negara.(Jukgar Binwiltasla, 2021)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melihat implementasi program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir guna mewujudkan keamanan maritim di wilayah perbatasan Sabang. Spotmar TNI AL melaksanakan peningkatan ketahanan masyarakat dalam rangka pembinaan wilayah perbatasan laut sesuai Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 9 huruf (e), bahwa tugas TNI Angkatan Laut adalah melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla), juga sebagai bentuk partisipatif TNI AL terhadap kegiatan dalam keanggotaan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) namun masih perlu untuk melihat implementasi dilapangan apakah sudah berjalan sesuai rencana ataukah perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah, urgensi penelitian, *das sein*, *das sollen*, dan *gap* yang sudah diuraikan, maka peneliti memutuskan untuk menemukan *ways* dalam meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Sabang

sebagai program Spotmar TNI AL agar permasalahan keamanan maritim di wilayah perbatasan bisa berkurang (*end state*).

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dikaji dalam penyusunan tesis ini adalah melihat bagaimana Implementasi Program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang. Dengan indikator Ketahanan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sakdapolrak sebagai ukuran keberhasilan yaitu; kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah (*Coping Capacities*) dalam hal ini adalah proses recovery, kemampuan untuk beradaptasi (*Adaptive Capacities*) dan kemampuan untuk bertransformasi (*Transformative Capacities*) masyarakat hidup normal kembali sebagai bentuk ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Sabang.

1.2.2 Subfokus Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan Implementasi Program Spotmar TNI AL Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Guna Mewujudkan Keamanan Maritim di wilayah Perbatasan Sabang secara khusus, subfokus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hal-hal yang menghambat program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Sabang, diantaranya:

- a. Kondisi ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang saat ini
- b. Implementasi program Spotmar TNI AL dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang
- c. Konsep untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang

1.3. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengacu terhadap gap antara implementasi program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang dengan kenyataan bahwa adanya gangguan keamanan di wilayah perbatasan Sabang yang menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap ketahanan sosial. Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat kebutuhan untuk melihat bagaimana program Spotmar TNI AL ini mampu untuk diimplementasikan dengan baik atau masih perlu dievaluasi kembali sehingga dapat mengurangi gangguan keamanan maritim di wilayah perbatasan Sabang.

Bagaimana program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan masyarakat harus diimplementasikan sebagai suatu kebijakan yang efektif. Sehingga peneliti dalam kesempatan ini akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Guna mewujudkan keamanan maritim di wilayah perbatasan Sabang” Dengan demikian maka peneliti menyusun beberapa pertanyaan penelitian guna membantu menyelesaikan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang saat ini?
- b. Bagaimana implementasi program Spotmar TNI AL meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang?
- c. Bagaimana membangun konsep untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut.

- a. Menemukan kondisi ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang saat ini
- b. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang
- c. Membangun konsep untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bersifat teoritis dan praktis yang mampu menghasilkan suatu masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Spotmar TNI AL dan instansi terkait untuk memutuskan suatu program yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional masyarakat di wilayah perbatasan kota Sabang serta dilakukan implementasinya. Adapun yang dimaksud manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap perkembangan teoritis dari ketahanan masyarakat berdasarkan data dan informasi di lapangan serta merancang program Pembinaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Penelitian ini diharapkan bisa

menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi Regulator yaitu TNI AL dalam hal ini Spotmar TNI AL sebagai penentu kebijakan dalam bidang Potensi Maritim dengan Program Pembinaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui peningkatan ketahanan masyarakat untuk menyiapkan alat juang sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang mampu didayagunakan untuk membantu komponen utama. Sedangkan bagi Operator yaitu Pangkalan TNI AL Sabang sebagai pelaksana program dalam bidang potensi maritim.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam hal ini sebagai pengamat yang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Spotmar TNI AL mempunyai kemampuan partisipatif dalam ikut melaksanakan Pembinaan Wilayah Perbatasan dan PPKT baik secara Personel maupun material. Pemerintah Daerah Kota Sabang sebagai rekomendasi terhadap pengambilan keputusan yang efektif, memberi arahan pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah Perbatasan Sabang.